

BAB IV
FAKTOR YANG MENYEBABKAN CHINA BERSIKERAS
MEMPERTAHANKAN TIBET

Partai dan birokrasi yang memiliki kekuasaan dan peran penting dalam sistem pemerintahan China menganggap bahwa Tibet merupakan wilayah teritori China. Sehingga pertahanan atas wilayah Tibet merupakan kepentingan nasional yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sedangkan sikap pemberontakan rakyat Tibet merupakan suatu penghalang bagi tercapainya kepentingan nasional China terlebih dengan adanya intervensi dunia internasional dalam masalah Tibet.

China sebagai negara berdaulat berhak mempertahankan kepentingan nasionalnya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bisa menentukan nasib bangsanya sendiri (otonom) tanpa intervensi negara manapun. Pemerintah China tidak ingin adanya campur tangan dunia internasional dalam masalah internal China, salah satunya terhadap masalah Tibet. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh China dalam dunia internasional, membuat China dapat menekan dunia internasional untuk tidak mengintervensi masalah China dan Tibet.

A. Pengaruh Partai dan Birokrasi di China

Partai Komunis China (PKC) sebagai partai tunggal yang berkuasa dalam sistem pemerintahan di China, adalah organisasi inti dan yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, dibalik pengaruh kuat yang dimiliki oleh PKC, terdapat birokrasi pemerintahan yang juga memiliki peran

penting dalam proses pembuatan dan berjalannya kebijakan luar negeri, juga mempunyai pengaruh dalam sistem pemerintahan China.

Dalam proses pengambilan keputusan luar negeri China, terdapat beberapa aktor-aktor yang terlibat dan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan, seperti yang disebutkan pada teori pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri China yaitu, Partai Komunis China dan Dewan Negara/Birokrasi.

1. Partai Komunis China (PKC)

Partai ini didirikan pada tahun 1921 di Shanghai oleh Mao Zedong. Sebagai partai tunggal, Sebagai partai tunggal di China, PKC adalah sumber kekuatan negara dan merupakan alat pengontrol utama negara yang telah sah secara undang-undang. Bahkan dalam bidang militer, PKC telah membentuk badan bernama Komisi Militer Pusat (KMP) yang kedudukannya di atas Tentara Pembebasan Rakyat. PKC juga bertugas mengontrol jalannya kegiatan masyarakat sipil. Kebebasan masyarakat sipil untuk mengemukakan pendapat atas kinerja partai maupun pemerintah sangat dibatasi bahkan dilarang. Segala bentuk organisasi kemasyarakatan atau perserikatan, juga di bawah pengawasan PKC.

Partai Komunis China adalah organisasi inti dari pembuatan kebijakan luar negeri di China. Namun, sebagian besar keputusan yang dibuat oleh PKC adalah sektor organisasi pemerintahan. Para kader PKC ini secara langsung telah diarahkan oleh petinggi organisasi partai dan terikat oleh disiplin yang memberikan kewenangan terhadap organisasi partai tunggal untuk menunjuk,

mempromosikan dan memperhentikan pejabat pemerintah di setiap cabang administrasi negara.

Partai Komunis China, bukan merupakan satu-satunya birokrasi yang bertugas dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan luar negeri, karena terdapat badan lain dalam pengambilan keputusan luar negeri. Sebagian besar urusan pemerintah pusat dilakukan oleh Dewan Negara di bawah naungan perdana menteri.

2. Birokrasi/Dewan Negara

Dewan Negara merupakan Badan Eksklusif pemerintah pusat pemerintahan China yang mengatur segala kebijakan dan peraturan pemerintahan China. Badan eksklusif ini, merupakan badan yang memiliki peran penting bagi pengambilan keputusan luar negeri China setelah PKC. Dewan Negara dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh Wakil Perdana Menteri dan Anggota Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 28 kementerian dan beberapa komisi di bawahnya. Badan ini merupakan badan yang menjalankan fungsi legislatif di China, badan ini memberikan hasil legislatifnya kepada kongres nasional yang diadakan setiap satu tahun sekali untuk kemudian mengatur seluruh administrasi kenegaraan sekaligus pemilihan calon presiden selanjutnya dari Partai Komunis China.

Perdana menteri dari Dewan Negara yang didominasi oleh Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, juga ditinjau oleh NPC. Sedangkan anggota lain dari Dewan Negara, didominasi oleh perdana menteri, ditinjau oleh NPC atau komite tetap, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di dewan

negara, setiap anggota memiliki masa jabatan lima tahun, dan tidak dapat diangkat kembali setelah dua periode yang berurutan.⁵⁶ Dewan Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan Partai Komunis China, serta peraturan dan hukum yang diadopsi oleh NPC dan berurusan dengan urusan seperti politik internal China, diplomasi, pertahanan nasional, keuangan, ekonomi, budaya dan pendidikan, juga dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan penerapannya.

China sebagai negara besar, terus berupaya menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat mandiri dan menjunjung tinggi perdamaian. Tujuan dasar dari kebijakan luar negeri China adalah senantiasa menjaga kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara, menciptakan lingkungan internasional yang menguntungkan untuk upaya reformasi, keterbukaan dan modernisasi, serta memelihara perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan umum.

Pengambilan kebijakan luar negeri dilakukan untuk, mencapai kepentingan nasional suatu negara. Bagi China, kepentingan nasional sebuah negara adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat yang berada dalam suatu negara tersebut. Karena itu, sangat penting untuk menjamin tegaknya sebuah negara yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional. Dalam pencapaian kepentingan nasional, pemerintah China memiliki prinsip dalam menjalankan politik luar negerinya, yaitu bersedia mengembangkan hubungan kerjasama, bersahabat dengan semua negara atas dasar saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, saling tidak mengagresi, saling tidak mengintervensi urusan dalam

⁵⁶Xinhua. The State Council
<http://english.gov.cn/2005-08/05/content-20763.htm>. Diakses 15 Maret 2013

negeri dan persamaan derajat. Pentingnya stabilitas domestik dan integritas territorial, sebagai hal yang merupakan kepentingan nasional negara, untuk menjadikan China sebagai negara adidaya yang berpengaruh dalam berbagai lingkup kehidupan global, ekonomi, dan politik, menjadikan pemerintah China menunjukkan sikap seriusnya pada masalah integritas teritori.

Tibet secara etnografis, merupakan klien patron dengan China yang merupakan warisan Dinasti Qing. Setelah keruntuhan Qing, China terbagi-bagi oleh kekuasaan para panglima perang. Proses unifikasi yang panjang, ditambah dengan kompetisi Guomintang dengan Komunis menjadikan daerah-daerah terluar China tidak diperhatikan, Tibet relatif tidak tersentuh oleh pemerintah China. Pada awal berdirinya Republik China pada tahun 1949, Mao Zedong dan para petinggi Partai Komunis China menekankan sikap defensive sebagai prioritas utama China dalam hubungan internasionalnya, salah satu sikap tersebut yaitu penyatuan kembali daerah-daerah terpencil dan terasing (terutama Tibet, Xinjiang, dan Mongolia dalam).

Sejak awal berdirinya Republik Rakyat China, Mao Zedong dan para petinggi Gong Chan Dang (Partai Komunis China) langsung menetapkan wilayah otonom untuk kantong populasi kelompok minoritas.⁵⁷ Sebagai bentuk dari sikap defensive pemerintah China terhadap wilayah-wilayah luaran China, maka pemerintah China mengirim bangsa Han sebagai bangsa yang mendominasi di China, untuk bertempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut, salah satunya Tibet.

⁵⁷Iwan Santosa, "Konflik Etnis, Ujian Pluralisme China"
<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/06/ln/1368849.htm>. Diakses 03 Maret 2013.

Pada masalah yang terjadi antara China dan Tibet, pemerintah China melihat adanya ancaman bagi keutuhan wilayah China, yang tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kepentingan nasional China pada sektor integritas teritori dan kedaulatannya atas wilayah-wilayah teritorinya. Pemerintah China mengklaim wilayah Tibet sebagai wilayah teritorinya, berdasarkan historis dan fakta-fakta yang membuktikan, bahwa Tibet merupakan salah satu wilayah teritori China. Sehingga pemerintah China beranggapan, bahwa China memiliki kedaulatan untuk tetap mempertahankan Tibet sebagai wilayah teritorinya. Klaim China atas wilayah Tibet sebagai bagian utuh tak terpisahkan dari kedaulatan China, juga dikutip dalam pernyataan Menteri Luar Negeri China, Hong Lei, tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut:

*"Tibetan affairs are China's domestic affairs. "Issues related to Tibet are major issues of principle concerning China's sovereignty and territorial integrity, rather than issues of ethnic minority, religion or human rights. China firmly opposes any country or anyone using Tibet-related issues to interfere in China's internal affairs."*⁵⁸

Kutipan di atas, secara tegas menyatakan bahwa, masalah Tibet merupakan masalah internal China dan pemisahan Tibet tidak mungkin disepakati oleh China karena menyangkut keutuhan wilayah dan integritas teritorialnya. Berbagai isu terkait dengan integritas teritorial, kelompok minoritas, agama dan hak asasi manusia merupakan urusan internal China dan ditegaskan bahwa, tidak

⁵⁸<http://www.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t997355.htm>. Diakses 17 April 2013.

ada satu negara pun yang berhak mencampuri permasalahan dalam negeri China termasuk konflik Tibet.

Hu Jintao juga menyampaikan pidatonya ke Kongres Partai ke-18, pada 15 November 2012. Pidato tersebut mengandung pernyataan tentang otonomi daerah etnis dan hubungan etnis minoritas. Pernyataan Hu sebagai berikut :

*"We should fully and faithfully implement the Party's policies concerning ethnic groups and uphold and improve the system of regional ethnic autonomy. We should, keeping to the goal of all ethnic groups working together for common prosperity and development, conduct intensive education about ethnic unity and progress, speed up development of ethnic minority areas, and protect the legitimate rights and interests of ethnic minorities. We should consolidate and develop socialist ethnic relations of equality, unity, mutual assistance and harmony so that all ethnic groups in China will live and develop together in harmony. We should comprehensively implement the Party's basic policy on religion and fully leverage the positive role of religious figures and believers in promoting economic and social development."*⁵⁹

Pidato tersebut merupakan pernyataan bahwa, semua etnis minoritas harus bersatu di bawah kekuasaan PKC dan pemerintahan terpusat China, para etnis

⁵⁹ <http://www.theepochtimes.com/n2/opinion/chinese-communist-party-congress-produces-futile-deal-316045.html>. Diakses 20 April 2013.

minoritas seperti Tibet, juga dilarang melakukan kegiatan yang dianggap separatis atau melawan "kesatuan" dari China. Keinginan untuk kemerdekaan Tibet, kebebasan Tibet, dan dukungan untuk Dalai Lama, dianggap merupakan "tindakan separatis". Sehingga pemisahan diri Tibet dari China, tidak mungkin akan disetujui oleh pemerintah China. Hal ini dilakukan agar tidak memicu tindakan separatis lebih jauh dan menghapus separatisme di China.

Namun, rakyat Tibet dan Dalai Lama menentang klaim pemerintah China atas Tibet dan mengajukan keinginannya untuk menjadi negara merdeka dan lepas dari China dan mendapatkan kemerdekaan yang diakui oleh dunia internasional. Untuk menunjang keinginan Tibet ini, rakyat Tibet melakukan berbagai macam pemberontakan pada pemerintah China dan berusaha menarik simpati dan dukungan sebanyak-banyaknya dari dunia internasional. Dengan sikap separatis yang dilakukan rakyat Tibet terhadap pemerintahan China, terlebih dengan adanya intervensi dunia internasional terhadap masalah ini, maka pemerintah China melihat hal ini sebagai suatu ancaman yang sangat serius bagi keutuhan dan bagi stabilitas keamanan negaranya, sehingga tindakan separatis ini harus dihentikan. China tidak akan menyetujui pemisahan diri Tibet, karena hal ini merupakan ancaman separatisme yang akan berpengaruh buruk bagi China dan akan memicu wilayah-wilayah separatis lain, untuk melepaskan diri dari China.

Dengan klaim pemerintah China atas Tibet, pemerintah China melihat bahwa masalah antara China dan Tibet merupakan masalah domestik yang terjadi di China. Sehingga, dunia internasional tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah tersebut. Integritas teritorial dan kedaulatan China atas Tibet yang

merupakan kepentingan nasional China, menjadi alasan pemerintah China bersikeras mempertahankan Tibet.

Menyikapi intervensi dunia internasional terhadap masalah kemerdekaan Tibet, pemerintah China menggunakan salah satu prinsip politik luar negeri yaitu tidak mengintervensi negara lain dalam urusan domestik yang terjadi pada negara tersebut. Hal ini sebagai perwujudan dari Lima Prinsip Koeksistensi Damai dalam menjalankan kerjasama dengan negara lain, yaitu saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara.

Sikap pemerintah China yang sangat bersikeras mempertahankan Tibet, tidak luput dari peranan penting Partai Komunis China dan birokrasi pemerintahan China, melihat peran penting PKC dan Birokrasi China dalam pengambilan kebijakan luar negeri dan penerapannya, juga peran pentingnya dalam menjalankan sistem pemerintahan China. Pemerintah China melihat, bahwa masalah ini merupakan masalah kepentingan nasional yang harus diperjuangkan dan dipertahankan.

Integritas teritori China atas Tibet telah membawa perubahan yang positif di Tibet, meskipun dibayar mahal dengan lunturnya budaya asli Tibet yang identik dengan feodalisme Dalai Lama. Bagi China melindungi kedaulatan dan integritas teritorial adalah inti dari kepentingan negara, bangsa, dan menjadi kewajiban seluruh rakyat China, termasuk Tibet. China sebagai negara yang berdaulat tidak akan menoleransi masalah pemisahan wilayah, dan setiap negara berdaulat

memiliki hak menggunakan segala upaya yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorinya.⁶⁰

Hal ini membuat pemerintah China semakin menjaga kesatuan wilayahnya, terlebih para pro Tibet yang mulai berani untuk berunjuk rasa dan berusaha menarik perhatian kepada dunia internasional dengan status Tibet sebagai wilayah yang terjajah. Demi menjaga integritas teritori dan kedaulatannya atas Tibet, pemerintah China menggunakan kekuatan militernya untuk menduduki Tibet. Namun, dibalik semua yang terjadi, justru dinilai positif oleh masyarakat internasional dengan melihat kemajuan pembangunan dan perekonomian Tibet yang maju.

Sebenarnya, upaya pemerintah China yang bersikeras mempertahankan Tibet tanpa memperdulikan segala bentuk ancaman dan resiko, selain faktor kedaulatan China atas Tibet, terdapat pula faktor-faktor yang lain. Faktor tersebut sangat berkaitan dengan sistem politik dalam negeri China yang menerapkan sistem pemerintahan terpusat. Kepentingan nasional China untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan keutuhan wilayah kedaulatannya, mendorong China tetap bersikeras untuk mempertahankan Tibet sebagai bagian utuh dari wilayah kedaulatan China dan tidak mentolerir aksi-aksi separatisme pejuang Tibet yang menuntut kemerdekaan dan lepas dari kekuasaan dan pengaruh China.

Selain masalah tersebut, tindakan China dalam mempertahankan Tibet menyangkut masalah kepentingan nasional China pada faktor letak geografis Tiibet yang berdampingan dengan negara pesaing China dan kekayaan sumber

⁶⁰China Rilis RUU Anti Pemisahan

<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0503/09/1n/1611845.htm>. Diakses 03 Maret 2013

daya alam yang ada di Tibet. Pemerintah China akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan Tibet tanpa menoleransi resiko apapun yang akan diterimanya dan tidak mengenal lelah dan menyerah dalam upaya tersebut.

B. Kepentingan China pada Sektor Sumberdaya Alam Tibet

Tibet adalah sebuah daerah luas sekitar 965.000 m² yang diyakini mengandung kandungan mineral dalam jumlah yang besar dan memiliki harga yang paling mahal di dunia saat ini. Menurut sebuah penelitian para ahli China yang dikeluarkan pada tahun 2007, menyatakan bahwa di Tibet mengandung masing-masing 40 juta ton dari tembaga, zinc, lead, dan lebih dari satu milyar ton besi berkualitas tinggi dan memperkirakan terdapat kandungan mineral senilai US\$81,3 juta di daerah Tibet Tengah dan Barat.⁶¹ Seperti penghasilan ladang minyak Amdo yang menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak mentah per tahun.

Adanya pernyataan penelitian kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Tibet, pemerintah China telah mengalokasikan investasi sebesar US\$1,2 miliar untuk mengembangkan sumber dayaalamini dan telah membangun saluran pipa untuk meningkatkan eksploitasi minyak dan gas alam Tibet.⁶²

Fakta tentang kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Tibet ini, dinilai oleh pemerintah China sebagai kekayaan yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi China. Beberapa pakar meramalkan, bahwa China adalah

⁶¹ China through a lens.
<http://www.china.org.cn/english/features/67817.htm>. Diakses 3 Maret 2013.

⁶² Revolusi Tibet.
<http://id.shvoong.com/books/1866289-revolusi-tibet/>. Diakses 04 Maret 2013.

salah satu negara yang akan bisa menduduki posisi negara adidaya dan mampu menggantikan posisi Amerika Serikat melalui ekonominya. Secara umum, Tibet memiliki simpanan Lithium terbesar didunia saat ini. Seperti yang kita ketahui, lithium adalah bahan vital bagi pembuatan baterai untuk alat elektronik seperti handphone dan laptop. Lithium juga dipercaya sebagai sumber energi untuk alat transportasi masa depan. Daerah yang memiliki kandungan Lithium tertinggi sebanyak 2,4 juta ton adalah Zhabuye, Damxung, Tajjinaer.

Kekayaan sumber daya alam Tibet lainnya adalah air. Tibet merupakan daerah aliran sungai utama di kawasan Asia. Sebagian besar aliran sungai di Tibet memiliki arus yang stabil yang berasal dari air tanah dan sumber glasial. Hal ini berbeda dengan aliran sungai di negara-negara tetangga yang banyak ditentukan oleh pola curah hujan musiman. Sembilan puluh persen sungai di Tibet memiliki arus yang tenang di sepanjang wilayah perbatasan. Kondisi alur sungai di sepanjang wilayah Tibet dengan arusnya yang deras dan stabil memiliki nilai penting sebagai sumber irigasi pertanian utama Tibet dan sebagai sumber potensial tenaga hidrolik dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik. Lereng yang curam dan aliran sungai yang melimpah memberikan Tibet memiliki potensi PLTA yang mampu menghasilkan lebih dari 250.000 megawatt, yang tertinggi dari negara manapun di dunia. PLTA Tibet sendiri memiliki potensi daya listrik sebesar 200.000 megawatt. Tibet memiliki potensi energi surya tertinggi di dunia dengan potensi energi rata-rata tahunan diperkirakan mencapai 200 kilokalori/cm, serta sumber daya panas bumi yang signifikan. Potensi inilah yang menjadi salah satu motivasi China untuk menguasai dan mengontrol secara penuh wilayah Tibet.

Sebab, sebagai negara industri maju China tentunya dihadapkan pada tingkat konsumsi sumber energi yang sangat besar untuk menggerakkan sektor industri sebagai penopang utama perekonomian China.

Tibet memang merupakan gudang kekayaan alam yang sangat penting bagi China. Terlebih lagi dengan adanya pertambangan Krom terpenting China yang terdapat di Tibet. Mengingat China telah menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, sektor industri China tentunya membutuhkan pasokan sumber bahan bakar dalam jumlah besar guna menjamin kelangsungan hidup industri China. Kekayaan SDA yang dimiliki Tibet khususnya mineral, mendorong pemerintah China untuk menguasai Tibet secara utuh sebagai salah satu aset yang sangat berharga. Hal ini bertujuan agar China tak lagi menggantungkan kebutuhan minyaknya dari luar negeri, mengingat harga minyak dunia kian melonjak, karena penguasaan China atas Tibet, akan menambah keuntungan negara, sehingga akan meningkatkan kekuatan, dominasi dan pengaruh China didunia internasional.

Sektor pertambangan Tibet mendapat dukungan pendanaan yang besar dari China yang sedang mengalami revolusi industri dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar komoditas China di seluruh dunia. China sedang dalam perjalanan untuk menjadi sebuah negara yang mandiri dan salah satu eksportir utama komoditas dunia, seiring banyak ditemukannya sumber-sumber tambang mineral baru di kawasan Tibet.

Ambisi China yang sangat besar untuk menguasai dan mengontrol Tibet secara penuh, mendorong China melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap potensi sumberdaya alam Tibet, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konversi wilayah hutan.
2. Sumber daya air dan tenaga air.
3. Mineral dan pertambangan.
4. Margasatwa.
5. Nuklir dan limbah beracun lainnya.

Kondisi alam wilayah Tibet yang kaya dengan sumberdaya alam, baik berupa kekayaan bahan tambang dan minyak bumi, kekayaan alur sungai sebagai sumber energi hidrolis dan sumber irigasi utama, menjadikan salah satu motivasi dan alasan kuat bagi pemerintah China untuk menguasai dan mengontrol secara penuh wilayah Tibet. Sehingga, pemerintah China sangat berkepentingan untuk mempertahankan wilayah Tibet sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah teritorial dan kedaulatan China. Untuk mempertahankan Tibet dan menguasai Tibet secara utuh, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah China akan melakukan segala cara, untuk menghilangkan ancaman apapun yang dapat menghambat keinginan pemerintah China ini, salah satunya mengenai bentuk intervensi dan gangguan dari pihak asing terkait konflik China dan Tibet.

C. Tibet Sebagai *Buffer Zone*

Selain menyangkut integritas teritori China atas Tibet, kepentingan nasional China terhadap Tibet yaitu mengenai keamanan wilayah. Hal ini sangat

berkaitan dengan letak geografis Tibet, yang berbatasan dengan negara-negara di Selatan dan India, yang merupakan negara saingan China. Sehingga Tibet menjadi zona penahan untuk menghadapi negara tetangga tersebut dan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada negara tetangga tersebut.⁶³

Berdasarkan lima prinsip koeksistensi secara damai, China terus mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia.⁶⁴ Dalam melaksanakan kepentingan pertahanannya, China senantiasa memegang prinsip sebagai negara yang menganut koeksistensi damai yang cinta damai, tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan kedaulatannya. Penggunaan cara-cara damai sebagai kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya sebagai jalan terakhir setelah usaha-usaha diplomatik tidak membuahkan hasil. China sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat di kawasan Asia, penyelenggaraan pertahanan yang dilaksanakan dengan sistem keseluruhan melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan.

Klaim China atas wilayah Tibet yang merupakan wilayah teritorinya, dilihat oleh pemerintah China juga memiliki kewajiban untuk ikut berperan menjaga pertahanan negara China. Letak geografis Tibet yang merupakan daerah terluar China, yang berbatasan langsung dengan India sebagai negara pesaing

⁶³Tiada Perdamaian di Shangri-La – Konflik China dan Tibet <http://absoluterevo.wordpress.com/2012/05/06/photo-eksekusi-mati-warga-tibet-oleh-tentara-china-warning-gruesome-photographs-viewer-discretion-advised/>. Diakses 03 Maret 2013.

⁶⁴Eddy Maszudi, "Makna Kunjungan SBY ke China", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/27/opi3.htm>. Diakses 19 Maret 2013.

China di dunia internasional saat ini dan diklaim sebagai negara kontroversi oleh China, merupakan suatu potensi sebagai wilayah yang sangat strategis untuk mejadi *Buffer Zone* antara kedua negara tersebut (China-India). Adanya konflik antara China dan India yang telah lama terjadi memungkinkan terjadinya perang antara kedua negara besar tersebut, karena dengan koeksistensi damai China dalam melakukan aktifitas politik dalam dunia internasional, sehingga pemerintah China masih mengedepankan faktor atau cara damai dalam penyelesaian suatu masalah dengan negara lain dibandingkan dengan menggunakan kontak senjata. Oleh karena itu, dalam konflik antara China dan India, perlu adanya suatu wilayah penahan agar tidak terjadi kontak bersenjata antara kedua negara besar yang berseteru (China-India).

Sengketa perbatasan yang terjadi antara China dan India, menjadikan terjadinya ketegangan diplomatik antara kedua negara tersebut. India menuduh, China secara tidak sah menduduki sebagian besar wilayah India di Jammu dan Kashmir. Pemerintah China juga, mengklaim sekitar 60.000 km persegi wilayah, di negara bagian Arunachal Pradesh di Timur Laut India yang berbatasan dengan Tibet. Hal ini membuat pemerintah China lebih meningkatkan perhatiannya pada wilayah persengketaan tersebut dan melihat bahwa wilayah Tibet merupakan wilayah yang tepat sebagai *buffer zone* dengan negara India, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih jauh, dalam hal ini yaitu kontak senjata.

Tibet memiliki nilai strategis dalam hubungan politik India-China, bahkan setelah 45 tahun masa pendudukan China yang disebabkan oleh kedekatan

hubungan dan kepentingan strategis kedua belah pihak. Kondisi ini merupakan manifestasi dari kelanjutan persaingan strategis yang terjadi di kawasan Asia dan Himalaya. Inti dari persaingan strategis India-China adalah adanya anggapan dari elit penguasa China yang mengklaim Tibet sebagai wilayah strategis yang berada di bawah kedaulatan teritorial China. Pada sisi lain, India juga memiliki persepsi dan klaim yang sama terkait nilai strategis Tibet bagi kepentingan keamanan dan pertahanan nasional India.

Selain letak geografis Tibet yang merupakan wilayah yang strategis sebagai *Buffer Zone* antara wilayah-wilayah di bagian Selatan dan India, faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah China yaitu, faktor kondisi alam geografis yang dimiliki Tibet, yaitu kondisi alam yang ekstrim dengan pegunungan yang mengelilinginya, sehingga menjadi faktor pendukung strategis menyangkut pertahanan negara yang sulit untuk ditembus oleh musuh.

Secara historis, penetapan wilayah perbatasan China dan India dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 1842, orang-orang Tibet dan penguasa Dogra dari kerajaan Jammu dan Kashmir menandatangani pakta non-agresi untuk menghormati garis perbatasan McMahon yang memisahkan wilayah perbatasan China dan India. Untuk memperjelas hal ini, pada tahun 1847 Inggris menarik garis perbatasan mulai dari sungai Spiti sampai ke Danau Pangong. Daerah yang menuju ke utara sampai ke Celah Karakoram telah dihapuskan. Penyesuaian garis batas pertama tercatat pada tahun 1865 ketika WH Johnson dari *Survey of India* berjalan kaki melintasi Chin Aksai dan menggambar peta ini termasuk di Jammu dan Kashmir. Johnson segera ditunjuk sebagai Komisaris Kashmir di Ladakh.

Departemen Luar Negeri Kashmir berpandangan bahwa perbatasan harus didorong lebih jauh ke kisaran Lun Kuen Aksai Chin untuk menyerap dan menempatkan daerah penyangga dibawah kontrol Inggris untuk membendung pengaruh Rusia, seperti yang dilakukan Inggris dengan Afghanistan.⁶⁵

Pada tahun 1892 China menempatkan penanda batas di Pass Karakoram dan mengatakan kepada perwira Inggris bahwa wilayah China mulai ada dengan perbatasan sepanjang kisaran Karakoram. Alasan yang diberikan untuk ini bahwa Chin Aksai dan Tibet merupakan bagian tak terpisahkandari wilayah kedaulatan China. Pada tahun 1998, Duta Besar China untuk India, Zhou Gang, menyatakan bahwa "tidak terdapat masalah evakuasi China dari Chin Aksai, karena Chin Aksai telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah China sejak zaman kuno dan sejak di bawah yurisdiksi administrasi China".

Pada tahun 1904, ekspedisi militer Inggris dikirim ke China di bawah kepemimpinan Kolonel Young untuk mencegah China jatuh di bawah pengaruh kekuasaan asing. Perjanjian The Anglo-Tibet Convention yang ditandatangani antara China dan Inggris menyatakan bahwa Inggris memiliki hak dan kekuasaan penuh dalam memonopoli perdagangan dan mengontrol langsung wilayah Tibet. Kondisi ini terus berlangsung sampai dengan perjanjian The Anglo-Chinese Convention pada 1906 sebagai kelanjutan dari perjanjian sebelumnya. Akan tetapi, perjanjian ini tidak bertahan lama, sebab China mencoba untuk menancapkan kembali kekuasaan dan pengaruhnya atas wilayah Tibet sampai dengan periode 1913, namun mengalami kegagalan dalam melawan Inggris. Pada

⁶⁵<http://orbat.com/site/sinoindianwar/1.htm>, Diakses 25 Maret 2013

tahun 1913, Tibet mendeklarasikan kemerdekaan dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan konferensi Simlapada tahun 1914 tentang kemerdekaan Tibet.⁶⁶

Konferensi Simla disepakati menjadi satu tripartit, dimana orang-orang Tibet adalah mitra dalam pembicaraan dengan China dan Inggris. Legalitas dari kemerdekaan Tibet menimbulkan keraguan banyak pihak terkait dengan posisi China yang menyatakan bahwa Tibet hanyalah sebuah provinsi China.

Pada akhirnya, satu-satunya hasil yang mengikat secara hukum adalah hasil konferensi 1914 yang melibatkan Inggris dan Tibet, yang masing-masing diwakili oleh Sir Henry McMahon dan Lonchen Shatra, mencapai kesepakatan penyelesaian perbatasan yang mengikat antara mereka, dengan menetapkan Garis McMahon sebagai garis demarkasi yang memisahkan wilayah perbatasan Tibet dan India. Pada pertemuan tersebut, delegasi China tidak diundang, garis McMahon adalah kesepakatan mengenai demarkasi perbatasan resmi antara Tibet dan India, yang menyoroti fakta bahwa semua pihak, termasuk China-Tibet diakui memiliki kewenangan penuh untuk bernegosiasi menyangkut wilayah perbatasan dengan India. Secara hukum, garis McMahon tidak ada hubungannya dengan China.⁶⁷

Beberapa wilayah yang dipersengketakan antara India dan China terkait klaim China atas wilayah Tibet, diantaranya sebagai berikut:⁶⁸

1. Sektor Timur: 90.000 km² di bawah kontrol India kemudian disebut

Badan North-East Frontier, atau NEFA.

⁶⁶*Ibid.* Diakses 25 Maret 2013

⁶⁷*Ibid.* Diakses 25 Maret 2013

⁶⁸<http://orbat.com/site/sinoindianwar/1.htm>. Diakses 25 Maret 2013

2. Sektor Tengah: 20.000 km² di kedua sisi DAS Himalaya.
3. Sektor Barat: 30.000 km² dari negara dataran tinggi yang dikenal sebagai Chin Aksai di distrik Ladakh Jammu dan Negara Kashmir berbatasan dengan Tibet dan provinsi Xinjiang China.

Hingga saat ini, klaim China untuk wilayah India didasarkan pada pengakuan-non Garis McMahan, terlepas dari pengakuan dan penerimaan otonomi Tibet dari Garis McMahan, yang didasarkan pada klaim ilegal mereka ke Tibet. Merebut kesempatan untuk berkembang di akhir 50-an, mereka bermain pada logika unik yang pasti sudah mengikat secara hukum bahwa Tibet secara sah menjadi bagian dari China. Tibet sebagai provinsi China, tidak bisa secara legal menjadi penandatanganan Konvensi Simla. Meskipun perjanjian dipahami bahwa delegasi Tibet hadir, dan fakta bahwa Chou Enlai sendiri meyakinkan Nehru bahwa otonomi Tibet diberikan ketika Perdana Menteri China mengunjungi India pada tahun 1954. Juga, orang China tidak pernah sebagai penandatanganan sebenarnya untuk Konvensi Simla, yang disetujui antara Tibet dan Inggris. Karena perjanjian unilateral mengenai demarkasi perbatasan tidak valid, seluruh garis demarkasi McMahan menimbulkan ketidakjelasan.

Fakta-fakta sejarah secara proaktif perlu diperjuangkan oleh pemerintah India, terkait invasi China atas Tibet pada tahun 1950, bukan dihapuskan atas dasar kekhawatiran dari ancaman situasi geo-politik dunia. Terkait fakta sejarah bahwa Tibet menjadi bagian dari wilayah China yang diperoleh dari tindakan invasi, yang tentu tidak dibenarkan oleh hukum internasional, akan memperkuat

posisi dan dukungan internasional terhadap kebijakan India dalam memperjuangkan wilayah perbatasannya dengan Tibet.

Berdasarkan temuan fakta di atas, penyusun dapat menganalisis bahwa letak geografis yang cukup strategis dalam konteks pertahanan negara dan kondisi alam wilayah Tibet yang didominasi oleh wilayah pegunungan dan alur sungai yang masih alami menjadi alasan kuat bagi China, untuk mempertahankan dan mengklaim secara penuh bahwa Tibet merupakan bagian dari wilayah teritorial dan kedaulatan China.

Bahkan wilayah Tibet yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang selama ini menjadi pesaing utama bagi dominasi China dalam kancah hubungan internasional, menjadikan China menerapkan kebijakan wilayah Tibet sebagai *buffer zone* (kawasan penyangga) bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional China. Sehingga setiap campur tangan pihak asing dalam masalah konflik Tibet dianggap sebagai sebuah ancaman serius bagi China dan dengan segala sumberdaya serta kekuatan yang dimilikinya baik militer maupun ekonomi akan memberikan respon secara serius terhadap segala bentuk intervensi asing terkait masalah Tibet.

Analisa ini diperkuat dengan fakta geografis Tibet yang cukup strategis dalam konteks pertahanan negara bagi kedua belah pihak, China dan India, yang apabila salah satu pihak menguasai dan mengontrol penuh atas wilayah Tibet, maka menjadi ancaman serius bagi pihak lain dalam menjaga wilayah teritorial kedaulatannya dan begitu pula sebaliknya.

Ketidajelasan penyelesaian masalah status wilayah Tibet di masa lalu dan ditambah dengan adanya keterlibatan Inggris yang pada saat itu menjadi salah satu negara dengan wilayah jajahannya yang sangat luas menjadikan konflik ini terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan dalam perkembangannya, wilayah Tibet yang berada dalam posisi dilematis diantara persaingan dua negara besar, yaitu India dan China yang sama-sama berambisi menjadi negara yang paling dominan baik secara politik, ekonomi dan militer dalam kancah hubungan internasional menjadikan konflik ini sulit terselesaikan secara tuntas.

Oleh karena itu, dengan melihat rumitnya konflik yang terjadi antara China dan India khususnya masalah perbatasan yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kontak bersenjata, maka pemerintah China merasa perlu adanya suatu wilayah yang strategis sebagai wilayah penyangga bagi kedua negara tersebut (China-India). Demi memegang koeksistensi damai China, sehingga pemerintah China menetapkan wilayah Tibet sebagai wilayah yang sangat strategis sebagai *Buffer Zone* untuk menghadapi wilayah-wilyah di Selatan dan India.

D. Posisi dan Peran Strategis China di Dunia Internasional

1. Kemajuan Ekonomi China

Kemajuan yang luar biasa oleh China, sejak dimulainya modernisasi pada tahun 1978 dalam bidang ekonomi, berhasil mengubah pandangan dunia, dari negara miskin ke negara kekuatan ekonomi dunia. Posisi China sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi nomer dua di dunia, mengancam posisi

kekaisaran dolar AS dalam mata uang dunia yang merupakan mata uang yang menjadi amunisi perdagangan internasional. Pengamat memprediksi, kekuatan ekonomi China akan menjadi tiga kali lipat dibanding dengan posisi dolar sekarang pada tahun 2040.⁶⁹ Prediksi ini dapat dilihat pada sejumlah kesepakatan dan fakta yang ada, diantaranya:

- a. China dan Jepang menekan kesepakatan yang mempromosikan penggunaan mata uang mereka sendiri, ketika berdagang satu sama lain. Laporan yang diberitakan oleh BBC, bahwa China dan Jepang mengumumkan rencana mempromosikan pertukaran langsung mata uang mereka, untuk memotong biaya bagi perusahaan dan mendongkrak perdagangan bilateral.⁷⁰ Kesepakatan ini memungkinkan para perusahaan untuk langsung saling menggunakan mata uang China dan Jepang satu sama lain.
- b. Para anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan), berencana memulai penggunaan mata uang mereka sendiri, ketika berdagang satu sama lain.

Sebuah kesepakatan baru bakal mengusung penggunaan mata

⁶⁹Dominasi Dolar AS Hampir Berakhir? Ada Peran Cina dan Iran <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/03/28/m1jhx-dominasi-dolar-as-hampir-berakhir-ada-peran-cina-dan-iran>. diakses 05 Maret 2013

⁷⁰Dominasi Amerika Serikat Bakal Tamat <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/12/11/mev11x-2030-dominasi-amerika-serikat-bakal-tamat> . Diakses 05 Maret 2013

uang nasional dalam perdagangan antar anggota BRICS.⁷¹

- c. Rusia dan China, selama lebih dari setahun telah menggunakan mata uang nasional mereka, ketika berdagang satu sama lain. Keduanya pun bertekad kuat meruntuhkan dominasi kekuatan dolar AS yang telah lama menjadi amunisi perdagangan internasional.
- d. Pada 2009, China menjadi partner perdagangan terbesar di negara-negara Afrika. China kini secara agresif mencoba meluaskan penggunaan mata uangnya di Benua Afrika. Sebuah laporan dari Bank terbesar Afrika, Standard Bank, baru-baru ini menyatakan sebagai berikut. "Kami memprediksi paling sedikit 100 dolar AS dalam perdagangan Sino-Afrika lebih dari angka perdagangan China dan Afrika pada 2010, akan digantikan dengan renminbi sepenuhnya hingga 2015. China benar-benar memiliki tekad mutlak, untuk mengganti cara bagaimana perdagangan internasional dijalankan. Dalam titik ini, sekitar 70 ribu perusahaan China resmi menggunakan mata uang negaranya dalam transaksi antar perbatasan.
- e. China dan Uni Emirat Arab, juga telah secepat menggunakan mata uang mereka, langsung dalam transaksi jual beli minyak.

⁷¹10 Alasan Dominasi Dolar Akan Runtuh

⁷¹<http://forum.viva.co.id/ekonomi/326116-kumpulan-berita-ekonomi-dunia-update-daily.html>.
Diakses 05 Maret 2013.

Memang UEA sekadar pemain kecil; namun langkah ini pasti akan mempengaruhi peningkatan perekonomian China.p

- f. China adalah importir minyak terbesar di Arab Saudi. China mengimpor 1,39 juta barel minyak per hari dari Saudi pada Februari 2012. Angka itu melonjak 39% dibanding waktu yang sama tahun 2011. Arab Saudi dan China tengah berkolaborasi mendirikan kilang minyak masif di Arab Saudi. Hal ini menimbulkan adanya hubungan kerjasama yang erat bagi China dan Arab Saudi. Pemimpin dari dua negara ini, juga bekerjasama secara agresif untuk meluaskan kerjasama dagang kedua bangsa.

Kemajuan China ini, memberi dampak pada kemajuan berbagai bidang lainnya, sehingga semakin menguatkan posisi dan peran China dalam dunia internasional, dalam hal ini dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.⁷²

Dalam bidang ekonomi, China berhasil meraih posisi kedua, sebagai negara dengan kekuatan perekonomian terbesar di dunia setelah melewati Jepang pada Agustus 2010.⁷³ Hal ini, disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian China pada posisi tertinggi di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi China sebesar 10,3% dan 9,7% pada tahun 2011.⁷⁴

⁷²Martin Jacques. (2011). *Ketika China Menguasai Dunia: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat*. Jakarta: Kompas, hal. 408.hal. 170.

⁷³China resmi selip Jepang. 2010. Kompas 18 Agustus, hal 9

⁷⁴Bank Indonesia. (2011). *Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Moneter: Perkembangan*

Pertumbuhan ekonomi China ini, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

China memiliki cadangan devisa mencapai 3,31 triliun dolar AS pada akhir tahun 2012, jumlah itu merupakan yang terbesar di dunia. Posisi cadangan devisa di akhir tahun, juga melonjak dibandingkan posisi di akhir September yang tercatat 3,29 triliun dolar AS. Bank Rakyat China, seperti dikutip *AFP*, menyebutkan peningkatan cadangan devisa tersebut, adalah dampak peningkatan surplus perdagangan. Surplus perdagangan China untuk 2012, mencapai level tertinggi selama empat tahun terakhir. Sepanjang 2012, surplus perdagangan China melonjak hingga 48,1% ke level 231,1 miliar dolar AS.⁷⁵

Selama ini, produk China banyak menguasai pasar-pasar di negara berkembang. Jumlah kredit perbankan di China pada akhir tahun 2012, juga mulai berkurang. Menurut data bank central, kredit pada bulan Desember, tercatat 73 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan November yang mencapai 84 miliar dolar AS.

Kesuksesan China dalam kemajuan ekonominya, menempatkan China sebagai negara yang sangat berpengaruh dalam dunia internasional, khususnya pada bidang ekonomi. China juga melakukan pendekatan ke berbagai negara di dunia, dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang, seperti pemberian bantuan tanpa syarat dengan mempertimbangkan dampak ekonomi kedepannya.⁷⁶ Hasilnya, negara-negara berkembang lebih cenderung menyukai

⁷⁵Ekonomi Dunia. *Tinjauan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Perbankan*, 2011 (5), hal. 6. Diakses dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4A917924-52DD-4D5C-B376D7ADECEA4A8D/23095/zTKMMei2012.pdf>, Diakses 05 Maret 2013.

⁷⁶*Anggaran Militer China Terbesar Kedua*. (2009). Kompas, 9 Juni. Diakses dari

menerima bantuan dari China dan lebih senang bekerjasama dengan China, dibandingkan dengan negara berpengaruh lainnya seperti Amerika Serikat.

Kemajuan ekonomi China yang pesat, menempatkan China sebagai negara yang konsumtif. Kebutuhan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya tersebut, pasti akan melibatkan negara-negara lain dalam melakukan kerjasama ekspor impor, yang pastinya sangat menguntungkan bagi China dan bagi negara-negara tersebut. Dengan bentuk pemerintahan China yang menganut paham sosialis, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah China, bisa saja menghentikan kerjasama yang telah dilakukannya dengan negara-negara lain, apabila China merasa negara tersebut telah mengganggu atau menjadi ancaman yang serius bagi China.

Hal ini, memudahkan China untuk menekan intervensi dunia internasional, dalam masalah China dan Tibet. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh China ini, menjadikan negara-negara internasional, khususnya negara berkembang, sangat membutuhkan China dalam melakukan kerjasama kerjasamanya pada sektor ekonomi. Hal ini menjadi senjata bagi pemerintah China, untuk mendesak negara-negara internasional secara tidak langsung, agar tetap berada di pihak China, dalam hal ini menyangkut konflik China-Tibet, dan tidak ikut campur dalam masalah internal. Karena, tidak menutup kemungkinan, pemerintah China akan memutuskan kerjasamanya dengan negara-negara yang menentang China, sehingga akan menimbulkan kerugian atas negara-negara itu sendiri.

<http://female.kompas.com/read/2009/06/09/14552348/Anggaran.Militer.China.Terbesar.Kedua>.
Diakses 06 Maret 2013.

2. Peran China dalam Politik Internasional

Kemajuan dan potensi China menjadi pemain dominan dalam dunia internasional, sudah ditulis dalam berbagai artikel dan buku, salah satunya dalam buku *China's Megatrends*, yang ditulis oleh John dan Doris Naisbitt. Dalam bukunya, Naisbitt menggambarkan bagaimana kebangkitan China menjadi pemain utama dalam dunia internasional. Dalam buku tersebut, mereka memaparkan 8 pilar yang membuat China berkembang pesat yaitu emansipasi pikiran, penyeimbangan *top-down* dan *bottom-up*, membingkai hutan dan membiarkan pepohonan tumbuh, menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan, persemaian artistik dan intelektual, bergabung dengan dunia, kebebasan dan keadilan, dan dari medali emas olimpiade menuju hadiah nobel. Kedelapan pilar inilah yang berusaha dielaborasi dan diimplementasikan oleh pemerintah China untuk menguasai dunia dan menjadi pesaing utama Barat.⁷⁷

Berhasilnya China menjadi salah satu pemain utama dalam dunia internasional dan dengan adanya pendapat berbagai ahli yang menyatakan China dapat menyeimbangi dominasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya pasca runtuhnya Uni Soviet. Melalui keberhasilannya dalam bidang ekonomi serta terciptanya kestabilan dalam negeri, posisi politik China dalam dunia internasional juga meningkat. Keunggulan China dalam politik internasional dapat dilihat dari perannya di PBB, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Sejak menggantikan Republik China (Taiwan) di PBB pada tahun 1971,

⁷⁷John dan Doris Naisbitt. (2010). *China's Megatrends: 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

China resmi menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan kepemilikan hak veto.

Kepemilikan hak veto tersebut, memberikan hak istimewa bagi China dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki hak veto. China bisa menggunakan hak vetonya untuk membatalkan semua resolusi yang berpotensi merugikan atau mengganggu kepentingan nasionalnya dan memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, China mulai memiliki pengaruh yang besar terhadap negara lain.

Salah satu masalah yang berpotensi merugikan dan mengganggu kepentingan nasionalnya yaitu, pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Tibet dan keinginan Tibet untuk memisahkan diri dari China juga intervensi dunia internasional atas penyelesaian masalah China dan Tibet. Dengan klaim pemerintah China atas wilayah Tibet, membuat pemerintah China merasa bahwa konflik yang terjadi antara China dan Tibet merupakan masalah domestik China yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Melihat intervensi dunia internasional terhadap masalah yang terjadi antara China dan Tibet, pemerintah China merasa bahwa tindakan intervensi yang dilakukan oleh dunia internasional ini, merupakan tindakan yang melanggar koeksistensi damai China dan melanggar prinsip politik luar negeri China. Hal ini mendorong pemerintah China untuk menghentikan tindakan intervensi ini, salah satunya yaitu menggunakan hak veto yang dimilikinya.

Dominasi China berikutnya yaitu kekuatan pertahanan keamanan. Dari segi kekuatan pertahanan keamanan, China tergolong negara yang kuat. Anggaran

militer China selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2008 sebesar USD 84,9 milyar dan menjadi sebesar USD 91,5 milyar pada tahun 2011.⁷⁸ Tahun 2011 China tercatat sebagai negara nomor dua dalam kekuatan militer terbesar di dunia.

Konsep keamanan China pada awal berdirinya masih bersifat tradisional. Konsep keamanan hanya meliputi kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Oleh karena itu, strategi keamanan yang diterapkan hanya berupa penggunaan militer dan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan integritas wilayah. Seiring perubahan dalam dunia internasional, konsep keamanan China juga mengalami perubahan dan perkembangan untuk menyesuaikan diri. Kondisi keamanan internasional sekarang sangat kompleks, untuk menghadapinya, China memegang teguh prinsip perdamaian, pembangunan, dan kerjasama antarnegara. Konsep keamanan China meliputi seluruh konsep keamanan, keamanan politik, ekonomi, militer, sosial, dan keamanan informasi. China juga memperkenalkan konsep keamanan barunya yang berdasarkan kepercayaan dan ikatan kepentingan bersama, kesetaraan, kerjasama, dan *win-win*.⁷⁹

Mengikuti perubahan internasional, untuk menyesuaikan diri, pemerintah China lebih mengedepankan perdamaian dalam kerjasama dengan negara lain dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara manapun. Dalam kerjasama politik China pada dunia internasional. China memperbanyak pemberian

⁷⁸China akan Tingkatkan Anggaran Militer. (2011). BBC, 4 Maret.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/03/110304_chinadefense.shtml.
Diakses tanggal 19 Maret 2013.

⁷⁹International Office of the State Council The People's Republic of China. (2010). *China's National Defense in 2010*. Beijing: Foreign Languages Press, hal. 24.

bantuannya kepada negara lain, khususnya negara berkembang, dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperolehnya.

Pendekatan yang dilakukan China pada sektor ini seperti *soft power* China berupa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah China pada negara-negara lain. Pendekatan China ke berbagai negara di dunia agak berbeda dengan Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terkesan memberikan bantuan bersyarat misalnya mensyaratkan penerapan demokrasi dalam memberikan bantuan ke negara berkembang, China justru memberikan bantuan tanpa syarat dengan mempertimbangkan dampak ekonomi ke depannya. Oleh karena itu, sekarang negara-negara berkembang, seperti yang berada di Afrika dan Amerika Latin, lebih cenderung menyukai menerima bantuan dari China dan lebih senang bekerjasama dengan China dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tindakan China ini tentunya demi pencapaian kepentingan nasionalnya, khususnya pemenuhan kebutuhan sumber daya alam, berupa minyak dan bahan mentah untuk industrinya.

Dengan begitu, negara yang diberikan bantuan oleh China secara tidak langsung akan bergantung pada China, sehingga untuk menentang kebijakan atau keinginan pemerintah China, negara tersebut akan mempertimbangkan banyak hal. Adanya ancaman dari negara lain, membuat pemerintah China tidak menutup kemungkinan akan mengambil tindakan yang tidak terduga, salah satunya dengan menghentikan bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada negara tersebut tanpa memandang resiko yang akan terjadi. Hal ini, pasti akan sangat merugikan negara tersebut.

Keunggulan China dalam perpolitikan internasional, juga dilihat dari keterlibatan dan pengaruhnya dalam berbagai organisasi dan forum internasional. Setelah menjalankan *open door policy*, China aktif terlibat dalam dunia internasional. Sekarang ini, China bergabung dalam berbagai organisasi, baik bersifat regional maupun global seperti, PBB dan organisasi di bawahnya, G-20, ASEAN+3, Shanghai Cooperation Organization (SCO), BRICS, dan lainnya. Keterlibatan China dalam berbagai forum internasional ini, semakin memperluas pengaruh China dalam perpolitikan internasional. Melalui organisasi dan forum internasional ini, China menanamkan pengaruhnya, dan bisa dikatakan berusaha mencari pendukungnya dalam pengambilan keputusan di PBB. Hal ini, terlihat dari masalahnya dengan Taiwan. Beberapa kali Permohonan Taiwan untuk menjadi anggota PBB, ditolak oleh kebanyakan negara untuk menjadi agenda sidang majelis umum PBB.

Selain pengaruhnya di PBB dan organisasi internasional lainnya, kekuatan politik China juga dapat terlihat dari makin eratnya hubungan bilateral maupun multilateralnya dengan banyak negara. Bahkan, sekarang China terkesan lebih disukai dibandingkan Amerika Serikat oleh beberapa negara, khususnya negara-negara yang tidak menyukai atau mulai meninggalkan Amerika Serikat, seperti negara-negara di Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Hal ini dikarenakan, metode pendekatan yang digunakan China berbeda dengan Amerika Serikat yang terkesan memaksakan nilai-nilainya. Sedangkan China, menggunakan pendekatan ekonomi, untuk menanamkan pengaruhnya di negara lain, salah satunya melalui negosiasi perdagangan. China sering menawarkan bantuan pembangunan

infrastruktur pada negara-negara berkembang lainnya, sebagai imbalan kontrak eksklusif sumber daya alam yang menguntungkan. Penurunan pengaruh Barat di Timur Tengah, Afrika Tengah dan Amerika Selatan, sangat kontras dengan peningkatan pengaruh China. Hal ini dikarenakan, China memanfaatkan penurunan pengaruh Amerika Serikat ini untuk mendapat simpati di kawasan tersebut.

Pemerintah China menganggap bahwa masalah yang terjadi antara China dan Tibet, merupakan masalah dalam negeri China, oleh sebab itu pemerintah China menekankan pada dunia internasional untuk tidak mengambil peran dalam mengintervensi penyelesaian masalah China dan Tibet. Dengan dominasi dan peran yang dimiliki China dalam dunia internasional, China dapat menekan dan menghentikan intervensi dari dunia internasional, terhadap masalah yang terjadi antara China dan Tibet. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya negara yang mengakui bahwa Tibet merupakan negara merdeka.

Tindakan yang dilakukan pemerintah China, untuk menghentikan intervensi dunia internasional pada kasus Tibet dengan menggunakan peran dan dominasinya dalam dunia internasional; yaitu dengan negosiasi yang dilakukan kepada negara tersebut, salah satunya Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan pada pertemuan China dan AS, Hu Jintao, mengakui masih "banyak yang perlu dibenahi" terkait penegakan hak asasi manusia di negaranya. Maka, China siap berdiskusi dengan AS mengenai isu HAM, namun tetap berdasarkan prinsip saling menghormati. Hu menyampaikan pandangan itu saat bertemu dengan Presiden AS, Barack Obama, di Gedung Putih, Rabu 19 Januari 2011. Hu mengatakan

bahwa China masih dalam tahap perbaikan atas penegakan HAM. Dia mengatakan bahwanegaranya masih menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa China siap berdiskusi dengan AS mengenai masalah HAM. Namun, Hu menekankan, diskusi berjalan dengan prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Bentuk perhatian pemerintah China, untuk menghentikan intervensi dunia internasional terhadap masalah domestik China, juga dengan memberikan syarat kerjasama antara China dan negara tersebut. Seperti yang dilakukan pemerintah China kepada AS sebagai negara pro Tibet, yang memberikan peringatan secara tersirat ke politisi dan pebisnis AS, pada pertemuan antara China dan AS di Washington DC, Rabu 15 Februari 2012, yang membahas tentang masalah kerjasama antara keduanya. Pemerintah China yang diwakili oleh Xi Jinping mengatakan, bahwa China siap bekerjasama lebih erat lagi dengan Amerika Serikat soal isu perdagangan dan keamanan global, termasuk membahas persoalan teknologi nuklir Iran dan Korea Utara. Namun disela-sela pidatonya, Xi juga memberi peringatan kepada AS agar tidak ikut campur dengan persoalan dalam negeri China, yaitu masalah Taiwan dan Tibet. Sikap pemerintah China ini, menunjukkan perhatian pemerintah China terhadap ketidaknyamanan pemerintah China terhadap intervensi yang dilakukan dunia internasional pada masalah domestik China, salah satunya masalah Tibet. Pemerintah China merasa bahwa intervensi dunia internasional terhadap masalah domestik China, telah melanggar prinsip politik luar negeri China dan dengan prinsip damai China dalam kerjasama

dengan negara lain. Dengan peran yang dimiliki China tersebut, maka dunia internasional akan mempertimbangkan banyak hal untuk mengintervensi masalah Tibet lebih jauh dan akan mengurangi tindakan intervensinya terhadap masalah ini.